



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN
PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara penetapan dan pembagian besaran serta petunjuk pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong Tahun Anggaran 2024 dalam suatu Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran serta Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah untuk Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6883);
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2022

tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3);

16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang

berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
10. Tuha Peut Gampong adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.
11. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Gampong yang selanjutnya disingkat RPJP adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBK yang dialokasikan kepada gampong

berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan gampong.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
19. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
20. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan gampong.
21. Tim Pelaksana di tingkat Gampong yang selanjutnya disebut Timlak adalah Tim yang dibentuk oleh Keuchik yang bertugas melaksanakan kegiatan fisik yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan kemasyarakatan gampong.
- (2) Tujuan diberikannya Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong adalah:
 - a. mewujudkan pemerintahan gampong yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
 - b. meningkatkan nilai-nilai keagamaan, adat dan sosial budaya dalam rangka penguatan pemerintahan gampong;
 - c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
 - d. memajukan perekonomian masyarakat gampong serta pemberdayaan masyarakat gampong;
 - e. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat gampong guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - f. mengefektifkan perencanaan pembangunan gampong dengan mendorong prakarsa, gerakan, dan

- partisipasi masyarakat gampong untuk pengembangan potensi dan aset gampong guna kesejahteraan bersama;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat gampong guna mewujudkan masyarakat gampong yang mampu memelihara kesatuan sosial;
 - h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan gampong; dan
 - i. meningkatkan pendapatan gampong dan ekonomi masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong.

BAB III SUMBER PENDANAAN DAN PENENTUAN BESARAN

Paragraf Kesatu Sumber Dana

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagi hasil pajak kepada gampong.
- (2) Pendanaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong bersumber dari APBK.

Paragraf Kedua Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak untuk Gampong ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah.
- (2) Sumber Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Gampong berasal dari penerimaan pajak daerah yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.
- (3) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing gampong.
- (4) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata sejumlah gampong, dengan cara $(10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 60\%) / \text{Jumlah gampong se-Kabupaten}$.
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk gampong sesuai kontribusi

pemasukan pajak daerah dari masing-masing gampong terhadap total pemasukan pajak gampong se-Kabupaten, dengan cara $(10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 40\%) \times (\text{jumlah pemasukan pajak daerah dari gampong yang bersangkutan} / \text{total pemasukan pajak daerah dari gampong se-Kabupaten})$.

Paragraf Ketiga
Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Besaran Bagi Hasil Retribusi untuk Gampong ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah.
- (2) Sumber Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.
- (3) Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing gampong.
- (4) Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata sejumlah gampong, dengan cara $(10\% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 60\%) / \text{Jumlah gampong se-Kabupaten}$; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk gampong sesuai kontribusi pemasukan retribusi daerah dari masing-masing gampong terhadap total pemasukan retribusi gampong se-Kabupaten, dengan cara $(10\% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 40\%) \times (\text{jumlah pemasukan retribusi daerah dari gampong yang bersangkutan} / \text{total pemasukan retribusi daerah dari gampong se-Kabupaten})$.

Pasal 6

- (1) Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) adalah:
 - a. nama dan kode wilayah gampong bersumber dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten; dan
 - b. jumlah pemasukan pajak dan retribusi masing-masing gampong dan atau rekapitulasi setiap kecamatan bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing gampong dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong.
- (2) Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping.

Pasal 8

- (1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;
 - b. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - c. melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong; dan
 - d. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;
 - b. melakukan pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan gampong;
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
 - e. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 10

- (1) Keuchik dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong.
- (2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB V PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 11

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong sebagai berikut:
 - a. telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Fasilitasi dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) telah ditetapkan, serta telah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten dan / atau didelegasikan kepada Camat.
 2. semua pekerjaan/kegiatan tahun dan atau tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
 4. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.
 - b. melengkapi/mencukupi dokumen sebagai berikut:
 1. permohonan penyaluran dari Keuchik/Pj. Keuchik kepada Bupati;
 2. fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong (untuk pengajuan tahap I);
 3. fotokopi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Gampong (untuk pengajuan tahap I);
 4. fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) (untuk pengajuan tahap I dan tahap II/akhir bila ada perubahan APBG);
 5. fotokopi Surat Keputusan (SK) Penunjukan Bank sebagai Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik);
 6. fotokopi rekening kas gampong (mengetahui Keuchik/Pj. Keuchik);
 7. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Keuchik.
 8. fotokopi Surat Keputusan (SK) Bendahara Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik);

9. fotokopi KTP Keuchik/Pj. Keuchik, dan Bendahara Gampong;
 10. pakta integritas bermeterai cukup;
 11. kwitansi penerimaan bermeterai cukup.
- (2) Pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dianggarkan setiap tahun dalam APBK.
- (2) Bupati menetapkan besaran sementara Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong untuk masing-masing gampong setiap awal tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Gampong membuka rekening kas gampong pada Bank diwilayahnya atau yang terdekat.
- (4) Keuchik mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten meneruskan berkas permohonan penyaluran berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
- (7) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dengan persetujuan Bupati melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (8) Bentuk persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (9) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong melalui Bank 100%, dengan tahapan yaitu:
 - a. tahap I pada bulan Juni, sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan November, sebesar 60% (enam puluh per seratus).
- (10) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digabungkan bila tahap sebelumnya tidak terealisasi.

- (11) Dalam hal terjadi selisih perhitungan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
- (12) Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong pada akhir tahun anggaran berjalan maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 13

- (1) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan kemasyarakatan gampong.
- (2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong mengacu pada RPJMG dan RKPG.

BAB VIII PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong merupakan bagian dari sumber pendapatan gampong.
- (3) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dituangkan dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (4) Keuchik atau Penjabat Keuchik sebagai pemegang kekuasaan keuangan gampong bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong.

Pasal 15

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (3) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kegiatan yang dibiayai dengan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Gampong.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap akhir tahun anggaran kepada Tim Fasilitasi paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Tim Fasilitasi melaporkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.
- (3) Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Januari 2024 M
18 Rajab 1445 H

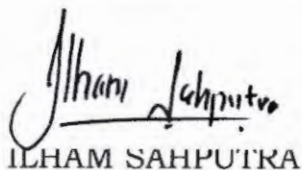
Pj. BUPATI ACEH SELATAN,



CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Januari 2024 M
18 Rajab 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



ILHAM SAHPUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN
 PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
 GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG
 DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHRD Kurang Bayar Tahun 2023	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	11.01.01.2001	KEUDE BAKONGAN	BAKONGAN	5.620.666	5.328.011	2.174.137	13.122.814
2	11.01.01.2002	UJONG MANGKI	BAKONGAN	5.574.985	4.440.115	1.811.824	11.826.924
3	11.01.01.2003	UJONG PADANG	BAKONGAN	4.650.603	4.440.115	1.811.824	10.902.542
4	11.01.01.2004	GAMPONG DRIEN	BAKONGAN	4.383.382	4.440.115	1.811.824	10.635.321
5	11.01.01.2015	DARUL IKHSAN	BAKONGAN	2.924.843	4.440.115	1.811.824	9.176.782
6	11.01.01.2016	PADANG BEURAHAN	BAKONGAN	3.702.789	4.440.115	1.811.824	9.954.728
7	11.01.01.2017	GAMPONG BARO	BAKONGAN	5.280.592	4.440.115	1.811.824	11.532.531
8	11.01.02.2001	FAJAR HARAPAN	KLUET UTARA	3.371.503	4.440.115	1.811.824	9.623.442
9	11.01.02.2002	KRUENG BATEE	KLUET UTARA	3.224.592	4.440.115	1.811.824	9.476.531
10	11.01.02.2003	PASI KUALA ASAHAN	KLUET UTARA	3.425.711	4.440.115	1.811.824	9.677.650
11	11.01.02.2004	GUNONG PULO	KLUET UTARA	4.300.784	4.440.115	1.811.824	10.552.723
12	11.01.02.2005	PULO IE I	KLUET UTARA	2.980.805	4.440.115	1.811.824	9.232.744
13	11.01.02.2006	JAMBO MANYANG	KLUET UTARA	3.699.953	4.440.115	1.811.824	9.951.892
14	11.01.02.2007	SIMPANG EMPAT	KLUET UTARA	4.563.772	14.384.547	5.869.728	24.818.047
15	11.01.02.2008	LIMAPURUT	KLUET UTARA	4.581.436	4.440.115	1.811.824	10.833.375
16	11.01.02.2009	PULO KAMBING	KLUET UTARA	5.023.232	4.440.115	1.811.824	11.275.171
17	11.01.02.2010	KAMPUNG PAYA	KLUET UTARA	3.106.332	4.440.115	1.811.824	9.358.271
18	11.01.02.2011	KRUENG BATU	KLUET UTARA	2.892.086	4.440.115	1.811.824	9.144.025
19	11.01.02.2012	KRUENG KLUET	KLUET UTARA	2.862.692	4.440.115	1.811.824	9.114.631
20	11.01.02.2013	ALURMAS	KLUET UTARA	4.246.050	4.440.115	1.811.824	10.497.989
21	11.01.02.2014	KAMPUNG TINGGI	KLUET UTARA	4.991.623	4.440.115	1.811.824	11.243.562
22	11.01.02.2015	RUAK	KLUET UTARA	4.705.777	4.440.115	1.811.824	10.957.716
23	11.01.02.2016	SIMPANG LHEE	KLUET UTARA	3.450.788	4.440.115	1.811.824	9.702.727
24	11.01.02.2017	SUAQ GERINGGENG	KLUET UTARA	2.910.341	4.440.115	1.811.824	9.162.280
25	11.01.02.2018	PASI KUALA BA'U	KLUET UTARA	3.934.701	4.440.115	1.811.824	10.186.640
26	11.01.02.2019	KEDAI PADANG	KLUET UTARA	2.870.202	4.440.115	1.811.824	9.122.141
27	11.01.02.2020	KOTAFAJAR	KLUET UTARA	6.311.044	56.128.963	22.903.867	85.343.874
28	11.01.02.2021	GUNUNG PUDUNG	KLUET UTARA	4.119.356	4.440.115	1.811.824	10.371.295
29	11.01.03.2018	SUAQ BAKUNG	KLUET SELATAN	4.800.161	4.440.115	1.811.824	11.052.100
30	11.01.03.2002	RANTAU BINUANG	KLUET SELATAN	4.445.286	4.440.115	1.811.824	10.697.225
31	11.01.03.2003	BARAT DAYA	KLUET SELATAN	2.870.385	4.440.115	1.811.824	9.122.324
32	11.01.03.2004	SIALANG	KLUET SELATAN	4.253.079	4.440.115	1.811.824	10.505.018
33	11.01.03.2005	KAPEH	KLUET SELATAN	6.225.657	4.440.115	1.811.824	12.477.596
34	11.01.03.2006	PULO IE	KLUET SELATAN	4.115.032	4.440.115	1.811.824	10.366.971
35	11.01.03.2007	KEDAI RUNDING	KLUET SELATAN	3.843.653	9.767.490	3.985.701	17.596.844
36	11.01.03.2008	KEDAI KANDANG	KLUET SELATAN	3.567.486	4.440.115	1.811.824	9.819.425
37	11.01.03.2009	GAMPONG LUAR	KLUET SELATAN	3.531.952	4.440.115	1.811.824	9.783.891
38	11.01.03.2010	UJUNG	KLUET SELATAN	3.307.517	4.440.115	1.811.824	9.559.456
39	11.01.03.2011	JUA	KLUET SELATAN	4.385.445	4.440.115	1.811.824	10.637.384
40	11.01.03.2012	PASI MEURAPAT	KLUET SELATAN	3.282.860	4.440.115	1.811.824	9.534.799
41	11.01.03.2013	UJUNG PASIR	KLUET SELATAN	3.410.257	4.440.115	1.811.824	9.662.196
42	11.01.03.2014	GEULUMBUK	KLUET SELATAN	4.996.935	4.440.115	1.811.824	11.248.874
43	11.01.03.2015	PASIE LEMBANG	KLUET SELATAN	7.866.668	4.440.115	1.811.824	14.118.607
44	11.01.03.2016	UJUNG PADANG	KLUET SELATAN	4.589.923	4.440.115	1.811.824	10.841.862
45	11.01.03.2017	INDRA DAMAI	KLUET SELATAN	5.832.342	4.440.115	1.811.824	12.084.281
46	11.01.04.2001	BAKAU HULU	LABUHANHAJI	5.388.982	4.440.115	1.811.824	11.640.921
47	11.01.04.2002	PADANG BAKAU	LABUHANHAJI	5.471.971	4.440.115	1.811.824	11.723.910
48	11.01.04.2003	MANGGIS HARAPAN	LABUHANHAJI	4.338.304	4.440.115	1.811.824	10.590.243
49	11.01.04.2004	PASAR LAMA	LABUHANHAJI	4.340.159	153.695.382	62.716.615	220.752.156
50	11.01.04.2005	APHA	LABUHANHAJI	4.750.404	4.440.115	1.811.824	11.002.343
51	11.01.04.2006	UJUNG BATU	LABUHANHAJI	5.311.590	4.440.115	1.811.824	11.563.529
52	11.01.04.2007	PAWOH	LABUHANHAJI	4.121.645	4.440.115	1.811.824	10.373.584
53	11.01.04.2008	DALAM	LABUHANHAJI	3.394.315	4.440.115	1.811.824	9.646.254
54	11.01.04.2009	KOTA PALAK	LABUHANHAJI	5.076.549	4.440.115	1.811.824	11.328.488

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHRD Kurang Bayar Tahun 2023	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55	11.01.04.2010	CACANG	LABUHANHAJI	4.454.357	4.440.115	1.811.824	10.706.296
56	11.01.04.2011	TENGAH PISANG	LABUHANHAJI	3.896.073	4.440.115	1.811.824	10.148.012
57	11.01.04.2012	PISANG	LABUHANHAJI	4.674.026	4.440.115	1.811.824	10.925.965
58	11.01.04.2013	HULU PISANG	LABUHANHAJI	5.391.645	4.440.115	1.811.824	11.643.584
59	11.01.04.2014	TENGAH BARU	LABUHANHAJI	4.409.684	4.440.115	1.811.824	10.661.623
60	11.01.04.2015	LEMBAH BARU	LABUHANHAJI	3.421.558	4.440.115	1.811.824	9.673.497
61	11.01.04.2016	PADANG BARU	LABUHANHAJI	3.903.751	4.440.115	1.811.824	10.155.690
62	11.01.05.2024	KUTA BULOH II	MEUKEK	4.854.714	4.440.115	1.811.824	11.106.653
63	11.01.05.2002	KUTA BULOH I	MEUKEK	4.322.958	4.440.115	1.811.824	10.574.897
64	11.01.05.2003	IE DINGEN	MEUKEK	3.222.068	4.440.115	1.811.824	9.474.007
65	11.01.05.2004	DRIEN JALO	MEUKEK	4.042.420	4.440.115	1.811.824	10.294.359
66	11.01.05.2005	JAMBO PAPEUN	MEUKEK	4.723.469	4.440.115	1.811.824	10.975.408
67	11.01.05.2006	BUKIT MEUH	MEUKEK	4.517.934	4.440.115	1.811.824	10.769.873
68	11.01.05.2007	BLANG KUALA	MEUKEK	5.131.676	4.440.115	1.811.824	11.383.615
69	11.01.05.2008	ROT TEUNGOH	MEUKEK	5.425.871	4.440.115	1.811.824	11.677.810
70	11.01.05.2009	ALUE BARO	MEUKEK	3.723.679	4.440.115	1.811.824	9.975.618
71	11.01.05.2010	LADANG TUHA	MEUKEK	4.181.004	4.440.115	1.811.824	10.432.943
72	11.01.05.2011	LHOK MAMPLAM	MEUKEK	3.325.439	4.440.115	1.811.824	9.577.378
73	11.01.05.2012	ARUN TUNGGAI	MEUKEK	4.937.770	4.440.115	1.811.824	11.189.709
74	11.01.05.2013	BLANG TEUNGOH	MEUKEK	4.354.636	4.440.115	1.811.824	10.606.575
75	11.01.05.2014	BLANG BLADEH	MEUKEK	5.280.880	4.440.115	1.811.824	11.532.819
76	11.01.05.2015	IE BUBOH	MEUKEK	4.077.535	4.440.115	1.811.824	10.329.474
77	11.01.05.2016	KEUDE MEUKEK	MEUKEK	3.979.441	4.440.115	1.811.824	10.231.380
78	11.01.05.2017	KUTA BARO	MEUKEK	4.404.003	20.200.264	8.242.877	32.847.144
79	11.01.05.2018	TANJUNG HARAPAN	MEUKEK	5.969.891	4.440.115	1.811.824	12.221.830
80	11.01.05.2019	LABUHAN TAROK	MEUKEK	5.721.378	12.431.177	5.072.640	23.225.195
81	11.01.05.2020	LHOK AMAN	MEUKEK	3.663.410	4.440.115	1.811.824	9.915.349
82	11.01.05.2021	ALUE MEUTUAH	MEUKEK	3.833.782	4.440.115	1.811.824	10.085.721
83	11.01.05.2022	LADANG BARO	MEUKEK	3.521.258	4.440.115	1.811.824	9.773.197
84	11.01.05.2023	LABUHAN TAROK II	MEUKEK	4.559.789	4.440.115	1.811.824	10.811.728
85	11.01.06.2001	DALAM	SAMADUA	3.413.360	4.440.115	1.811.824	9.665.299
86	11.01.06.2002	SUBARANG	SAMADUA	3.503.572	4.440.115	1.811.824	9.755.511
87	11.01.06.2003	KOTA BARU	SAMADUA	3.640.352	4.440.115	1.811.824	9.892.291
88	11.01.06.2004	GUNUNG KETEK	SAMADUA	4.116.877	4.440.115	1.811.824	10.368.816
89	11.01.06.2005	LADANG PANTON LUAS	SAMADUA	3.506.099	4.440.115	1.811.824	9.758.038
90	11.01.06.2006	MADAT	SAMADUA	3.319.182	4.440.115	1.811.824	9.571.121
91	11.01.06.2007	ALUR SUMERAH	SAMADUA	3.867.570	4.440.115	1.811.824	10.119.509
92	11.01.06.2008	TENGAH	SAMADUA	3.183.652	4.440.115	1.811.824	9.435.591
93	11.01.06.2009	GUNUNG CUT	SAMADUA	4.249.079	4.440.115	1.811.824	10.501.018
94	11.01.06.2010	ALUR PINANG	SAMADUA	4.779.926	4.440.115	1.811.824	11.031.865
95	11.01.06.2011	KUTA BLANG	SAMADUA	4.744.425	4.440.115	1.811.824	10.996.364
96	11.01.06.2012	BATEE TUNGGAI	SAMADUA	5.363.120	4.440.115	1.811.824	11.615.059
97	11.01.06.2013	UJUNG TANAH	SAMADUA	6.625.302	4.440.115	1.811.824	12.877.241
98	11.01.06.2014	UJUNG KAMPUNG	SAMADUA	3.473.540	4.440.115	1.811.824	9.725.479
99	11.01.06.2015	JILATANG	SAMADUA	3.835.908	4.440.115	1.811.824	10.087.847
100	11.01.06.2016	LUAR	SAMADUA	3.880.908	4.440.115	1.811.824	10.132.847
101	11.01.06.2017	LUBUK LAYU	SAMADUA	5.413.181	4.440.115	1.811.824	11.665.120
102	11.01.06.2018	SUAQ HULU	SAMADUA	4.548.761	4.440.115	1.811.824	10.800.700
103	11.01.06.2019	TAMPANG	SAMADUA	5.366.207	4.440.115	1.811.824	11.618.146
104	11.01.06.2020	PAYONAN GADANG	SAMADUA	3.902.248	4.440.115	1.811.824	10.154.187
105	11.01.06.2021	GADANG	SAMADUA	4.703.055	4.440.115	1.811.824	10.954.994
106	11.01.06.2022	BARU	SAMADUA	5.656.703	4.440.115	1.811.824	11.908.642
107	11.01.06.2023	LADANG KASIK PUTIH	SAMADUA	3.537.548	10.930.633	4.460.331	18.928.512
108	11.01.06.2024	AIR SIALANG HILIR	SAMADUA	3.515.675	4.440.115	1.811.824	9.767.614
109	11.01.06.2025	AIR SIALANG HULU	SAMADUA	5.271.181	4.440.115	1.811.824	11.523.120
110	11.01.06.2026	AIR SIALANG TENGAH	SAMADUA	4.193.210	4.440.115	1.811.824	10.445.149
111	11.01.06.2027	BALAI	SAMADUA	4.101.320	4.440.115	1.811.824	10.353.259
112	11.01.06.2028	ARAFAH	SAMADUA	4.962.580	4.440.115	1.811.824	11.214.519
113	11.01.07.2001	SIKULAT	SAWANG	4.310.767	4.440.115	1.811.824	10.562.706
114	11.01.07.2002	SAWANG I	SAWANG	4.968.587	4.440.115	1.811.824	11.220.526
115	11.01.07.2003	MEULIGO	SAWANG	4.486.845	4.440.115	1.811.824	10.738.784
116	11.01.07.2004	LHOK PAWOH	SAWANG	5.516.527	13.319.072	5.434.953	24.270.552
117	11.01.07.2005	SAWANG II	SAWANG	3.979.383	4.440.115	1.811.824	10.231.322
118	11.01.07.2006	UJUNG KARANG	SAWANG	4.126.531	4.440.115	1.811.824	10.378.470

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHRD Kurang Bayar Tahun 2023	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
119	11.01.07.2007	TRIENG MEUDURO BAROH	SAWANG	4.585.602	4.440.115	1.811.824	10.837.541
120	11.01.07.2008	TRIENG MEUDURO TUNONO	SAWANG	4.469.561	4.440.115	1.811.824	10.721.500
121	11.01.07.2009	PANTON LUAS	SAWANG	4.954.194	4.440.115	1.811.824	11.206.133
122	11.01.07.2010	SIMPANG TIGA	SAWANG	5.829.355	4.440.115	1.811.824	12.081.294
123	11.01.07.2011	KUTA BARO	SAWANG	3.593.795	4.440.115	1.811.824	9.845.734
124	11.01.07.2012	BLANG GELINGGANG	SAWANG	4.569.671	4.440.115	1.811.824	10.821.610
125	11.01.07.2013	MUTIARA	SAWANG	4.787.000	4.440.115	1.811.824	11.038.939
126	11.01.07.2014	UJUNG PADANG	SAWANG	4.520.926	4.440.115	1.811.824	10.772.865
127	11.01.07.2015	SAWANG BA'U	SAWANG	4.365.963	48.834.900	19.927.467	73.128.330
128	11.01.08.2017	LHOK KEUTAPANG	TAPAKTUAN	7.182.953	4.440.115	1.811.824	13.434.892
129	11.01.08.2018	HILIR	TAPAKTUAN	10.808.889	222.780.841	90.907.488	324.497.218
130	11.01.08.2019	PADANG	TAPAKTUAN	3.834.650	4.440.115	1.811.824	10.086.589
131	11.01.08.2020	HULU	TAPAKTUAN	4.593.041	4.440.115	1.811.824	10.844.980
132	11.01.08.2021	JAMBO APHA	TAPAKTUAN	10.639.740	4.440.115	1.811.824	16.891.679
133	11.01.08.2022	TEPI AIR	TAPAKTUAN	4.141.003	4.440.115	1.811.824	10.392.942
134	11.01.08.2023	PASAR	TAPAKTUAN	6.310.923	58.697.646	23.952.038	88.960.607
135	11.01.08.2024	LHOK BENGKUANG	TAPAKTUAN	9.145.711	4.440.115	1.811.824	15.397.650
136	11.01.08.2009	PANTON LUAS	TAPAKTUAN	4.277.217	4.440.115	1.811.824	10.529.156
137	11.01.08.2010	GUNUNG KERAMBIL	TAPAKTUAN	5.421.744	4.440.115	1.811.824	11.673.683
138	11.01.08.2011	AIR BERUDANG	TAPAKTUAN	4.869.443	4.440.115	1.811.824	11.121.382
139	11.01.08.2012	BATU ITAM	TAPAKTUAN	5.136.514	4.440.115	1.811.824	11.388.453
140	11.01.08.2013	PANJUPLAN	TAPAKTUAN	3.435.906	4.440.115	1.811.824	9.687.845
141	11.01.08.2014	LHOK RUKAM	TAPAKTUAN	4.028.611	7.547.750	3.079.919	14.656.280
142	11.01.08.2015	AIR PINANG	TAPAKTUAN	5.544.888	4.440.115	1.811.824	11.796.827
143	11.01.08.2016	LHOK BENGKUANG TIMUR	TAPAKTUAN	6.361.825	172.074.823	70.216.491	248.653.139
144	11.01.09.2001	KEUDE TRUMON	TRUMON	4.429.708	4.440.115	1.811.824	10.681.647
145	11.01.09.2002	UJONG TANOAH	TRUMON	4.227.003	6.455.639	2.634.274	13.316.916
146	11.01.09.2003	SIGLENG	TRUMON	4.226.984	4.440.115	1.811.824	10.478.923
147	11.01.09.2004	IE MEUDAMA	TRUMON	5.208.992	4.440.115	1.811.824	11.460.931
148	11.01.09.2005	TEUPIN TINGGI	TRUMON	6.423.074	4.884.063	1.992.981	13.300.118
149	11.01.09.2006	KUTA BARO	TRUMON	3.934.352	4.440.115	1.811.824	10.186.291
150	11.01.09.2007	PANTON BILIE	TRUMON	4.826.392	4.440.115	1.811.824	11.078.331
151	11.01.09.2012	KUTA PADANG	TRUMON	3.663.734	4.821.911	1.967.619	10.453.264
152	11.01.09.2013	RAKET	TRUMON	3.784.230	4.440.115	1.811.824	10.036.169
153	11.01.09.2014	GAMPONG TEUNGOH	TRUMON	8.220.172	4.440.115	1.811.824	14.472.111
154	11.01.09.2015	SENEUBOK JAYA	TRUMON	6.271.740	4.440.115	1.811.824	12.523.679
155	11.01.09.2016	PADANG HARAPAN	TRUMON	4.440.367	4.440.115	1.811.824	10.692.306
156	11.01.10.2001	LADANG TEUNGOH	PASIE RAJA	3.728.298	4.440.115	1.811.824	9.980.237
157	11.01.10.2002	PUCOK KRUENG	PASIE RAJA	3.658.601	4.440.115	1.811.824	9.910.540
158	11.01.10.2003	SILOLO	PASIE RAJA	4.993.146	4.440.115	1.811.824	11.245.085
159	11.01.10.2004	KAMPUNG BARU	PASIE RAJA	4.265.464	4.440.115	1.811.824	10.517.403
160	11.01.10.2005	PANTON BILI	PASIE RAJA	4.033.706	4.440.115	1.811.824	10.285.645
161	11.01.10.2006	PAYA ATEUK	PASIE RAJA	4.248.416	4.440.115	1.811.824	10.500.355
162	11.01.10.2007	LADANG TUHA	PASIE RAJA	6.931.134	9.767.490	3.985.701	20.684.325
163	11.01.10.2008	MATA IE	PASIE RAJA	5.900.765	4.440.115	1.811.824	12.152.704
164	11.01.10.2009	UJONG BATEE	PASIE RAJA	4.795.738	4.440.115	1.811.824	11.047.677
165	11.01.10.2010	LHOK SIALANG CUT	PASIE RAJA	5.403.095	4.440.115	1.811.824	11.655.034
166	11.01.10.2011	SEUNEUBOK	PASIE RAJA	5.682.742	4.440.115	1.811.824	11.934.681
167	11.01.10.2012	IE MIRAH	PASIE RAJA	5.020.951	4.440.115	1.811.824	11.272.890
168	11.01.10.2013	PASIE RASIAN	PASIE RAJA	4.011.165	4.440.115	1.811.824	10.263.104
169	11.01.10.2014	UJUNG PADANG RASIAN	PASIE RAJA	4.927.703	4.440.115	1.811.824	11.179.642
170	11.01.10.2015	KRUENG KALEE	PASIE RAJA	4.200.577	4.440.115	1.811.824	10.452.516
171	11.01.10.2016	LHOK SIALANG RAYEUK	PASIE RAJA	7.568.217	4.440.115	1.811.824	13.820.156
172	11.01.10.2017	GAMPONG BARO	PASIE RAJA	4.243.419	4.440.115	1.811.824	10.495.358
173	11.01.10.2018	TEUPIN GAJAH	PASIE RAJA	6.392.684	4.440.115	1.811.824	12.644.623
174	11.01.10.2019	UJUNG PADANG ASAHAN	PASIE RAJA	3.381.347	4.440.115	1.811.824	9.633.286
175	11.01.10.2020	PULO IE II	PASIE RAJA	4.267.371	4.440.115	1.811.824	10.519.310
176	11.01.10.2021	PANTE RAJA	PASIE RAJA	4.775.439	4.440.115	1.811.824	11.027.378
177	11.01.11.2001	TENGAH PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	4.565.169	4.440.115	1.811.824	10.817.108
178	11.01.11.2002	PAYA PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	3.971.593	4.440.115	1.811.824	10.223.532
179	11.01.11.2003	PADANG PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	3.535.199	4.440.115	1.811.824	9.787.138
180	11.01.11.2004	AUR PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	3.909.378	4.440.115	1.811.824	10.161.317
181	11.01.11.2005	LIMAU SARING	LABUHANHAJI TIMUR	3.626.417	4.440.115	1.811.824	9.878.356
182	11.01.11.2006	BEUTONG	LABUHANHAJI TIMUR	3.763.124	4.440.115	1.811.824	10.015.063

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHRD Kurang Bayar Tahun 2023	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
183	11.01.11.2007	PEUNEULOP	LABUHANHAJI TIMUR	3.704.473	4.440.115	1.811.824	9.956.412
184	11.01.11.2008	GUNUNG ROTAN	LABUHANHAJI TIMUR	5.292.482	4.440.115	1.811.824	11.544.421
185	11.01.11.2009	KEUMUMU HILIR	LABUHANHAJI TIMUR	5.265.009	4.440.115	1.811.824	11.516.948
186	11.01.11.2010	KEUMUMU HULU	LABUHANHAJI TIMUR	3.438.352	4.440.115	1.811.824	9.690.291
187	11.01.11.2011	KEUMUMU SEBERANG	LABUHANHAJI TIMUR	3.510.384	4.440.115	1.811.824	9.762.323
188	11.01.11.2012	SAWANG INDAH	LABUHANHAJI TIMUR	4.317.987	4.440.115	1.811.824	10.569.926
189	11.01.12.2001	TUTONG	LABUHANHAJI BARAT	7.572.760	4.440.115	1.811.824	13.824.699
190	11.01.12.2002	TENGAH IBOH	LABUHANHAJI BARAT	6.299.261	4.440.115	1.811.824	12.551.200
191	11.01.12.2003	PEULOKAN	LABUHANHAJI BARAT	4.736.179	4.440.115	1.811.824	10.988.118
192	11.01.12.2004	KUTA IBOH	LABUHANHAJI BARAT	5.464.475	4.440.115	1.811.824	11.716.414
193	11.01.12.2005	UJUNG PADANG	LABUHANHAJI BARAT	5.258.355	4.440.115	1.811.824	11.510.294
194	11.01.12.2006	BLANG BARU	LABUHANHAJI BARAT	5.012.722	4.440.115	1.811.824	11.264.661
195	11.01.12.2007	BLANG POROH	LABUHANHAJI BARAT	4.461.232	4.440.115	1.811.824	10.713.171
196	11.01.12.2008	PULO IE	LABUHANHAJI BARAT	3.499.389	4.440.115	1.811.824	9.751.328
197	11.01.12.2009	SUAK LOKAN	LABUHANHAJI BARAT	7.436.037	4.440.115	1.811.824	13.687.976
198	11.01.12.2010	IKU LHUENG	LABUHANHAJI BARAT	3.905.649	4.440.115	1.811.824	10.157.588
199	11.01.12.2011	KUTA TRIENG	LABUHANHAJI BARAT	9.543.436	4.440.115	1.811.824	15.795.375
200	11.01.12.2012	PANTE GEULIMA	LABUHANHAJI BARAT	4.607.323	4.440.115	1.811.824	10.859.262
201	11.01.12.2013	PANTON PAWOH	LABUHANHAJI BARAT	5.083.162	4.440.115	1.811.824	11.335.101
202	11.01.12.2014	BATEE MEUCANANG	LABUHANHAJI BARAT	3.292.791	4.440.115	1.811.824	9.544.730
203	11.01.12.2015	PANTON RUBEEK	LABUHANHAJI BARAT	4.469.983	4.440.115	1.811.824	10.721.922
204	11.01.13.2001	KOTO	KLUET TENGAH	5.042.303	8.435.646	3.442.232	16.920.181
205	11.01.13.2002	ALUR KEUJRUN	KLUET TENGAH	3.501.732	4.440.115	1.811.824	9.753.671
206	11.01.13.2003	JAMBOR PAPAN	KLUET TENGAH	4.069.830	4.440.115	1.811.824	10.321.769
207	11.01.13.2004	MALAKA	KLUET TENGAH	5.128.621	4.440.115	1.811.824	11.380.560
208	11.01.13.2005	KOTO INDARUNG	KLUET TENGAH	3.882.350	4.440.115	1.811.824	10.134.289
209	11.01.13.2006	SIURAI-URAI	KLUET TENGAH	3.457.695	4.440.115	1.811.824	9.709.634
210	11.01.13.2007	KAMPUNG SAWAH	KLUET TENGAH	4.549.757	4.440.115	1.811.824	10.801.696
211	11.01.13.2008	KAMPUNG PADANG	KLUET TENGAH	4.736.329	4.440.115	1.811.824	10.988.268
212	11.01.13.2009	PULO AIR	KLUET TENGAH	3.470.667	4.440.115	1.811.824	9.722.606
213	11.01.13.2010	LAWE MELANG	KLUET TENGAH	3.699.126	4.440.115	1.811.824	9.951.065
214	11.01.13.2011	MERSAK	KLUET TENGAH	3.303.055	4.440.115	1.811.824	9.554.994
215	11.01.13.2014	SIMPANG DUA	KLUET TENGAH	4.764.025	4.440.115	1.811.824	11.015.964
216	11.01.13.2015	SIMPANG TIGA	KLUET TENGAH	3.664.005	4.440.115	1.811.824	9.915.944
217	11.01.14.2001	PAYA DAPUR	KLUET TIMUR	5.391.177	4.440.115	1.811.824	11.643.116
218	11.01.14.2002	SAPIK	KLUET TIMUR	7.099.828	4.440.115	1.811.824	13.351.767
219	11.01.14.2003	ALAI	KLUET TIMUR	4.847.078	4.440.115	1.811.824	11.099.017
220	11.01.14.2004	DURIAN KAWAN	KLUET TIMUR	7.550.131	4.440.115	1.811.824	13.802.070
221	11.01.14.2005	LAWE SAWAH	KLUET TIMUR	5.438.708	4.440.115	1.811.824	11.690.647
222	11.01.14.2006	LAWE BULUH DIDI	KLUET TIMUR	3.949.345	4.440.115	1.811.824	10.201.284
223	11.01.14.2007	PUCUK LEMBANG	KLUET TIMUR	7.925.417	4.440.115	1.811.824	14.177.356
224	11.01.14.2008	PAYA LABA	KLUET TIMUR	5.378.351	4.440.115	1.811.824	11.630.290
225	11.01.14.2009	LAWE CIMANOK	KLUET TIMUR	5.048.286	4.706.484	1.920.518	11.675.288
226	11.01.15.2001	PASI SEUBADEH	BAKONGAN TIMUR	3.929.873	6.215.907	2.536.450	12.682.230
227	11.01.15.2002	LADANG RIMBA	BAKONGAN TIMUR	4.077.431	4.440.115	1.811.824	10.329.370
228	11.01.15.2003	UJONG PULO RAYEUK	BAKONGAN TIMUR	11.467.067	4.440.115	1.811.824	17.719.006
229	11.01.15.2004	SAWAH TINGKEUM	BAKONGAN TIMUR	3.194.408	4.440.115	1.811.824	9.446.347
230	11.01.15.2005	SIMPANG	BAKONGAN TIMUR	5.031.837	4.440.115	1.811.824	11.283.776
231	11.01.15.2006	UJONG PULO CUT	BAKONGAN TIMUR	3.553.736	4.440.115	1.811.824	9.805.675
232	11.01.15.2008	SEULEUKAT	BAKONGAN TIMUR	4.909.190	4.440.115	1.811.824	11.161.129
233	11.01.16.2005	PINTO RIMBA	TRUMON TIMUR	3.254.741	4.440.115	1.811.824	9.506.680
234	11.01.16.2006	KRUENG LUAS	TRUMON TIMUR	3.882.725	7.103.802	2.898.763	13.885.290
235	11.01.16.2007	JAMBO DALEM	TRUMON TIMUR	3.854.704	4.440.115	1.811.824	10.106.643
236	11.01.16.2008	KAPA SEUSAK	TRUMON TIMUR	44.035.420	4.440.115	1.811.824	50.287.359
237	11.01.16.2009	SEUNEUBOK PUNTO	TRUMON TIMUR	2.862.692	4.440.115	1.811.824	9.114.631
238	11.01.16.2010	SEUNEUBOK PUSAKA	TRUMON TIMUR	3.038.159	4.440.115	1.811.824	9.290.098
239	11.01.16.2011	ALUE BUJOK	TRUMON TIMUR	3.647.053	4.440.115	1.811.824	9.898.992
240	11.01.16.2012	TTI POBEN	TRUMON TIMUR	3.568.536	4.440.115	1.811.824	9.820.475
241	11.01.17.2001	BUKET GADENG	KOTA BAHAGIA	5.096.164	6.571.065	2.681.375	14.348.604
242	11.01.17.2002	RAMBONG	KOTA BAHAGIA	3.942.162	4.440.115	1.811.824	10.194.101
243	11.01.17.2003	SEUNEUBOK KEURANJI	KOTA BAHAGIA	3.916.968	4.440.115	1.811.824	10.168.907
244	11.01.17.2004	SEUNEUBOK ALUR BULOH	KOTA BAHAGIA	3.216.887	4.440.115	1.811.824	9.468.826
245	11.01.17.2005	UJONG TANOH	KOTA BAHAGIA	5.430.575	4.440.115	1.811.824	11.682.514
246	11.01.17.2006	UJONG GUNONG CUT	KOTA BAHAGIA	3.709.674	4.440.115	1.811.824	9.961.613

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHRD Kurang Bayar Tahun 2023	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
247	11.01.17.2007	UJONG GUNONG RAYEUK	KOTA BAHAGIA	4.724.312	4.440.115	1.811.824	10.976.251
248	11.01.17.2008	BEUTONG	KOTA BAHAGIA	3.554.784	4.440.115	1.811.824	9.806.723
249	11.01.17.2009	JAMBO KEUPOK	KOTA BAHAGIA	4.839.143	4.440.115	1.811.824	11.091.082
250	11.01.17.2010	ALUR DUAMAS	KOTA BAHAGIA	6.105.899	4.440.115	1.811.824	12.357.838
251	11.01.18.2001	LADANG RIMBA	TRUMON TENGAH	3.553.641	11.099.333	4.529.171	19.182.145
252	11.01.18.2002	GUNONG KAPHO	TRUMON TENGAH	4.365.360	4.440.115	1.811.824	10.617.299
253	11.01.18.2003	KAMPONG TEUNGOH	TRUMON TENGAH	3.128.094	4.440.115	1.811.824	9.380.033
254	11.01.18.2004	KRUENG BATEE	TRUMON TENGAH	4.204.468	4.440.115	1.811.824	10.456.407
255	11.01.18.2005	PULO PAYA	TRUMON TENGAH	4.582.468	4.440.115	1.811.824	10.834.407
256	11.01.18.2006	JAMBO PAPEUN	TRUMON TENGAH	3.832.105	4.440.115	1.811.824	10.084.044
257	11.01.18.2007	COT BAYU	TRUMON TENGAH	5.746.252	4.440.115	1.811.824	11.998.191
258	11.01.18.2008	NACA	TRUMON TENGAH	5.520.921	4.440.136	1.811.824	11.772.881
259	11.01.18.2009	IE JEUREUNEH	TRUMON TENGAH	5.843.775	4.440.115	1.811.824	12.095.714
260	11.01.18.2010	LHOK RAYA	TRUMON TENGAH	4.724.311	4.440.115	1.811.824	10.976.250
Total				1.240.500.000	1.924.050.000	785.123.800	3.949.673.800

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,



CUT SYAZALISMA